

## Perempuan dan Ekonomi Perawatan

### Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Ekonomi Perawatan

### Artikel

Meninjau Kembali Tren Partisipasi Angkatan kerja Perempuan di Indonesia

*Ariane J. Utomo*

Kompleksitas Kerja Perempuan dengan HIV Positif: Studi Kasus di DKI Jakarta

*Andi Nur Faizah*

Menakar Otonomi Perempuan Kepala Keluarga dalam Kegiatan Simpan Pinjam di Sebuah Lembaga Keuangan Mikro

*Linda Yuliantini*

Bekerja, Berumah Tangga dan Berorganisasi: Sistem Patriarki dalam Tiga Ruang Hidup Perempuan

*Indrasari Tjandraningsih*

Pekerja Perempuan dalam Pasar Tenaga Kerja Indonesia: Marginalisasi Yang Tak Terhindarkan

*Poppy Ismalina*

Ekonomi Perawatan dan Beban Kerja Ibu Rumah Tangga di Indonesia

*Atnike Nova Sigiro, Alfindra Primaldhi & Bagus Takwin*

Diterbitkan oleh:

YAYASAN  
**YJP**  
JURNAL  
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan  
No. Akreditasi: 748/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

# Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia  
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke [ima@jurnalperempuan.com](mailto:ima@jurnalperempuan.com))

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **[www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)**

Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295,  
email: [ima@jurnalperempuan.com](mailto:ima@jurnalperempuan.com)).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org) dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

**Gadis Arivia**

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

**PENDIRI**

Dr. Gadis Arivia  
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno  
Ratna Syafrida Dhanny  
Asikin Arif (Alm.)

**DEWAN PEMBINA**

Dr. Gadis Arivia  
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno  
Mari Elka Pangestu, Ph.D.  
Svida Alisjahbana

**DIREKTUR EKSEKUTIF**

Dr. Atnike Nova Sigirow

**PEMIMPIN REDAKSI**

Anita Dhewy, M.Si.

**DEWAN REDAKSI**

Atnike Nova Sigirow, M.Sc. (Pascasarjana Diplomasi, Universitas Paramadina)  
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)  
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)  
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)  
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)  
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)  
Mariana Amiruddin, M.Hum. (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)  
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)  
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)

**MITRA BESTARI**

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)  
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)  
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)  
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)  
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)  
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)  
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)  
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)  
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies University of Western Australia)  
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)  
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)

Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)

Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)

Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)

Dr. Widjajanti M Santoso (Gender, Sosiologi & Media, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Hukum & Gender, Universitas Indonesia)

Francisca Saveria Sika Ery Seda, Ph.D. (Sosiologi, Gender & Kemiskinan, Universitas Indonesia)

Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sejarah, Gender & Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)

Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen dan Feminisme, Appalachian State University, USA)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)

Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

**REDAKSI PELAKSANA**

Andi Misbahul Pratiwi, M.Si.

**SEKRETARIS REDAKSI**

Abby Gina Boangmanalu, M.Hum.

**REDAKSI**

Bella Sandiata, M.H.  
Iqraa Runi Aprilia

**SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN**

Himah Sholihah  
Gery Andri Wibowo  
Hasan Ramadhan

**DESAIN & TATA LETAK**

Dina Yulianti

**ALAMAT REDAKSI :**

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540  
Telp./Fax (021) 2270 1689  
E-mail: [yjp@jurnalperempuan.com](mailto:yjp@jurnalperempuan.com)  
[redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)

**WEBSITE:**

[indonesianfeministjournal.org](http://indonesianfeministjournal.org)

Cetakan Pertama, November 2018

## Daftar Isi

### Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Ekonomi Perawatan / *Women and The Care Economy* ..... iii

### Artikel / Articles

- Meninjau Kembali Tren Partisipasi Angkatan kerja Perempuan di Indonesia / *Revisiting the Trends of Female Labour Force Participation in Indonesia* ..... 193-202  
*Ariane J. Utomo*
- Kompleksitas Kerja Perempuan dengan HIV Positif: Studi Kasus di DKI Jakarta / *The Complexity of Work for Women who are HIV Positive: A Case Study in DKI Jakarta* ..... 203-213  
*Andi Nur Faizah*
- Menakar Otonomi Perempuan Kepala Keluarga dalam Kegiatan Simpan Pinjam di Sebuah Lembaga Keuangan Mikro / *Measuring the Autonomy of Female Family Heads in Savings and Loans Activities at a Microfinance Institution* ..... 215-226  
*Linda Yuliantini*
- Bekerja, Berumah Tangga dan Berorganisasi: Sistem Patriarki dalam Tiga Ruang Hidup Perempuan / *Working, Housekeeping and Organizing: The Patriarchal System in Three Women's Living Spaces* ..... 227-233  
*Indrasari Tjandraningsih*
- Pekerja Perempuan dalam Pasar Tenaga Kerja Indonesia: Marginalisasi Yang Tak Terhindarkan / *Women Workers in the Indonesian Labor Market: Inevitable Marginalization* ..... 235-247  
*Poppy Ismalina*
- Ekonomi Perawatan dan Beban Kerja Ibu Rumah Tangga di Indonesia / *Care Economy and the Burden of Housewives' Work in Indonesia* ..... 249-258  
*Atnike Nova Sigi, Alfindra Primaldhi & Bagus Takwin*

## Perempuan dan Ekonomi Perawatan

### *Women and The Care Economy*

**D**ua dasawarsa terakhir kita menyaksikan tingginya permintaan terhadap tenaga kerja di sektor perawatan. Perempuan-perempuan dari desa dan daerah terpencil bermigrasi menuju kota-kota besar di dalam dan di luar negeri. Mereka menjadi pekerja rumah tangga, mengasuh anak-anak, merawat orang-orang lansia, memasak makanan dan membersihkan rumah. Mereka melakukan pekerjaan yang selama ini dikenal sebagai kerja perawatan tak dibayar.

Dalam konteks ekonomi pasar, kerja perawatan/pengasuhan yang umumnya dilakukan perempuan dipandang bukan merupakan kerja produktif yang berkontribusi terhadap ekonomi. Itu sebabnya kerja perawatan diserahkan kepada rumah tangga untuk pengaturannya. Akibatnya, kerja perawatan dalam rumah tangga individu biasanya tidak dibayar, tidak diakui dan mendapat sedikit dukungan. Konsekuensi lainnya ketika kerja perawatan diberikan dalam kontrak, ia tidak hanya dibayar rendah, tetapi juga tidak diatur, tidak aman dan penuh eksploitasi.

Kenyataannya kerja perawatan tak dibayar merupakan faktor yang sangat penting dalam menyokong ekonomi dibayar. Ia menyuplai kebutuhan sehari-hari pekerja dan menyubsidi reproduksi pekerja untuk akumulasi modal.

Meski banyak dibicarakan hingga kini belum ada definisi baku tentang ekonomi perawatan. Secara umum ekonomi perawatan mengacu pada sektor kegiatan ekonomi, baik yang dibayar maupun yang tak

dibayar, terkait dengan penyediaan perawatan sosial dan material. Ia mencakup perawatan untuk anak-anak, orang tua, dan orang cacat, perawatan kesehatan, pendidikan, juga rekreasi dan layanan pribadi lainnya, yang semuanya berkontribusi untuk memelihara dan mendukung populasi sekarang dan masa depan.

Perawatan menjadi perhatian utama feminis karena pengaturannya sangat berbasis gender dan berimplikasi pada hal-hal yang dapat dilakukan laki-laki dan perempuan. Norma-norma sosial yang mengaitkan perempuan dengan kepedulian pada sesama memiliki konsekuensi ekonomi yang signifikan yang berkontribusi terhadap ketidaksetaraan gender baik dalam rumah tangga maupun dalam pasar tenaga kerja (Badgett & Folbre 1999). Pemisahan perempuan ke dalam kerja-kerja perawatan misalnya, turut menjelaskan bertahannya perbedaan upah berdasarkan gender.

Untuk itu ada kebutuhan atas kontrak sosial baru guna mendefinisikan ulang hubungan gender. Selain itu mengacu pada Lynch (2009) penting juga mempertimbangkan peran negara. Negara perlu mengambil tanggung jawab untuk memastikan bahwa kerja perawatan tidak mengarah pada kemiskinan dan eksklusi sosial. Ia harus dikeluarkan dari ranah privat dan dibingkai sebagai tanggung jawab bersama. Di bawah kontrak sosial yang dinegosiasikan ini setiap individu yang terlibat kerja perawatan akan memiliki berbagai hak ekonomi sosial yang dipenuhi oleh negara, bukan oleh anggota keluarga. (**Anita Dhewy**)



---

Ariane J. Utomo (School of Geography, The University of Melbourne, Melbourne, Australia)

**Meninjau Kembali Tren Partisipasi Angkatan kerja Perempuan di Indonesia**

***Revisiting the Trends of Female Labour Force Participation in Indonesia***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 4, November 2018, hal. 193-202, 1 tabel, 4 gambar, 23 daftar pustaka

There are two problems that often emerge in public discussions about the recent trends in the level of participation of the female labor force in Indonesia. The first is the low Indonesian female labour force participation rate (FLFPR) compared to other ASEAN countries. The second is the trend of stagnation of Indonesian FLFPR—at around 51%—over almost three decades. By reviewing cross-country data from the Global Gender Gap Index and the International Labor Organization, this article rests on the argument that the two features of Indonesian FLFPR are not merely bad news, and should be read in the context of large economic growth and social change in Indonesia. But a more critical and thorough interpretation of the trend of this indicator does not deny the fact that there is still wide room to improve women's economic participation and opportunity in Indonesia.

Keywords: demographics, female labor force participation rates, employment statistics, social change, economic development, ASEAN, Gender Gap Index

Ada dua masalah yang sering muncul dalam diskusi publik soal tren tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAKP) di Indonesia akhir-akhir ini. Yang pertama adalah rendahnya TPAKP Indonesia dibanding negara ASEAN lain. Yang kedua adalah tren stagnasi TPAKP Indonesia—pada kisaran 51%—dalam hampir tiga dasawarsa terakhir. Dengan meninjau kembali data lintas negara dari Indeks Kesenjangan Gender Global dan International Labor Organisation, artikel ini bertumpu pada argumen bahwa kedua fitur TPAKP Indonesia tersebut bukan semata-mata kabar buruk, dan sebaiknya dibaca dalam konteks besar pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial di Indonesia. Namun penafsiran yang lebih kritis dan saksama terhadap tren indikator ini tidak menampik fakta bahwa masih ada ruang lebar untuk memperbaiki partisipasi dan kesempatan ekonomi perempuan di Indonesia.

Kata kunci: demografi, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, statistik ketenagakerjaan, perubahan sosial, pembangunan ekonomi, ASEAN, Indeks Kesenjangan Gender

---

Andi Nur Faizah (Program Studi Kajian Gender, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia)

**Kompleksitas Kerja Perempuan dengan HIV Positif: Studi Kasus di DKI Jakarta**

***The Complexity of Work for Women who are HIV Positive: A Case Study in DKI Jakarta***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 4, November 2018, hal. 203-213, 10 daftar pustaka

The phenomenon of HIV-AIDS transmission places women in a difficult situation. The loss of family members such as husbands due to AIDS

leaves women living with HIV positive in a struggle to access sources of livelihood. The condition of themselves as PLWHA, concerns about being stigmatized, caring for family members, and earning a living are the burdens of life they have to face. In this regard, this paper explores the complexity of the work of HIV-positive women. This study uses a qualitative method with a feminist perspective to get a complete picture of the livelihood of HIV-positive women. Based on interviews with five HIV-positive women, the findings found a link between social, identity, and gender categories that affect their livelihoods. HIV-positive women also transform themselves into their "normal" self by pretending to be healthy, able to work, have quality, and be independent. This is done as a form of resistance to the stigma attached to PLWHA.

Keywords: multi-layered burden, livelihood, HIV-positive women, stigma

Fenomena penularan HIV-AIDS menempatkan perempuan pada situasi yang sulit. Kehilangan anggota keluarga seperti suami akibat AIDS membuat perempuan yang hidup dengan HIV positif harus berjuang guna mengakses sumber-sumber penghidupan. Kondisi diri sebagai ODHA, kekhawatiran mendapatkan stigma, mengasuh anggota keluarga, serta mencari nafkah adalah beban hidup dan beban kerja yang mereka hadapi. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini menggali kompleksitas kerja perempuan dengan HIV positif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berperspektif feminis guna mendapatkan gambaran utuh mengenai penghidupan perempuan dengan HIV positif. Berdasarkan wawancara pada lima orang perempuan dengan HIV positif, didapat temuan adanya keterkaitan antara kategori sosial, identitas, dan gender yang memengaruhi penghidupan mereka. Perempuan dengan HIV positif juga melakukan transformasi sebagai diri yang "normal" dengan menunjukkan diri sebagai sosok yang sehat, mampu bekerja, memiliki kualitas, serta mandiri. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap stigma yang dilekatkan pada ODHA.

Kata kunci: beban berlapis, penghidupan, perempuan dengan HIV positif, stigma

---

Linda Yuliantini (Program Studi Kajian Gender, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia)

**Menakar Otonomi Perempuan Kepala Keluarga dalam Kegiatan Simpan Pinjam di sebuah Lembaga Keuangan Mikro**

***Measuring the Autonomy of Female Family Heads in Savings and Loans Activities at a Microfinance Institution***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 4, November 2018, hal. 215-226, 2 tabel, 1 gambar, 20 daftar pustaka

It is important to study the autonomy of women's autonomy, because it is relational, multidimensional and influences the lives of women, especially regarding actions and decision-making in all aspects of their lives. This research explores the autonomy of female household heads (PEKKA) in savings and loan activities at a microfinance institution both individually and collectively. Pekka's individual autonomy is seen in the context of power through *power within*, *power to*, and *power over*, while collective autonomy is in line with the *power with* concept offered by Linda Mayoux. This study uses a qualitative approach with a female perspective. Data collection was conducted through in-depth interviews with five subjects that were selected purposively. The results showed that participation in savings and credit activities increased the autonomy of individual female heads of household more significantly compared to collective autonomy in groups.

Keywords: female head of household, individual autonomy, collective autonomy, savings and loans

Otonomi perempuan penting untuk dikaji, karena bersifat relasional, multidimensi serta berpengaruh terhadap kehidupan perempuan terutama terkait tindakan dan pengambilan keputusan dalam segala aspek kehidupan mereka. Penelitian ini menggali otonomi perempuan kepala keluarga dalam kegiatan simpan pinjam di sebuah lembaga keuangan mikro baik secara individu maupun kolektif. Otonomi individu Pekka dilihat dalam konteks kekuasaan melalui power within, power to, dan power over, sedangkan otonomi kolektif sejalan dengan konsep power with yang ditawarkan oleh Linda Mayoux. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif perempuan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap lima subjek yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi dalam kegiatan simpan pinjam meningkatkan otonomi individu perempuan kepala keluarga secara lebih signifikan dibandingkan dengan otonomi kolektif dalam kelompok.

Kata kunci: perempuan kepala keluarga, otonomi Individual, otonomi kolektif, simpan pinjam

---

Indrasari Tjandraningsih (Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Indonesia)

### **Bekerja, Berumah Tangga dan Berorganisasi: Sistem Patriarki dalam Tiga Ruang Hidup Perempuan**

#### ***Working, Housekeeping and Organizing: The Patriarchal System in Three Women's Living Spaces***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 4, November 2018, hal. 227-233, 13 daftar pustaka

This paper discusses women's labor activities in trade union and the obstacles they encounter. The discussion focuses on the three roles carried out by women factory workers in domestic space as mothers and wives and in public space as laborers as well as activists of labor organizations. The information in this paper derived from observations of women factory workers' activities in union organization and two ethnographic books on factory workers' resistance. The subject was chosen because for more than two decades there was no significant changes in the position of women in the labor movement. The research questions of this paper are what are the obstacles for women workers to work and organize like male workers? Why are male workers so dominant, even in industries where the workforce is mostly women? How can women play the role as mothers, as workers and as leaders of labor organizations? The results of the analysis show the role and stereotype of gender in patriarchal societies within labor organizations is a barrier for women to become a significant player in the labor movement. However, strong determination for women to fight injustice supported by personal qualities proves that women are able to perform in the triple activities all at once.

Keywords: women factory workers, patriarchal society, gender role, trade union

Tulisan ini membahas aktivitas buruh perempuan dalam organisasi serikat pekerja dan hambatan-hambatan yang dihadapi. Pembahasan berfokus pada tiga peran yang dijalankan perempuan buruh pabrik di ruang domestik sebagai ibu dan istri dan di ruang publik sebagai buruh sekaligus aktivis organisasi buruh. Informasi dalam tulisan ini berasal dari amatan terhadap kegiatan berorganisasi perempuan buruh di serikat buruh dan dua buah buku bernuansa etnografis mengenai perlawanan buruh pabrik. Subjek dipilih karena selama lebih dari dua dekade tidak ada perubahan signifikan atas posisi perempuan dalam gerakan buruh. Pertanyaan yang hendak dijawab dalam tulisan ini adalah apa yang menjadi hambatan bagi buruh perempuan untuk bekerja dan berorganisasi seperti halnya buruh laki-laki? Mengapa buruh laki-laki begitu dominan pengaruhnya meskipun di industri yang tenaga kerjanya sebagian besar perempuan? Bagaimana para perempuan mampu menjalankan peran sebagai ibu, pekerja dan

sekaligus pimpinan organisasi buruh? Hasil analisis menunjukkan peran dan stereotip gender dalam masyarakat patriarkal di lingkungan organisasi buruh merupakan hambatan bagi perempuan untuk secara signifikan menjadi pemain utama dalam gerakan buruh. Akan tetapi determinasi yang kuat pada perempuan untuk melawan ketidakadilan didukung dengan kualitas personal membuktikan perempuan mampu berkegiatan dalam tiga arena sekaligus.

Kata kunci: buruh perempuan di pabrik, masyarakat patriarkis, peran gender, organisasi buruh

---

Poppy Ismalina (Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia)

### **Pekerja Perempuan dalam Pasar Tenaga Kerja Indonesia: Marginalisasi Yang Tak Terhindarkan**

#### ***Women Workers in the Indonesian Labor Market: Inevitable Marginalization***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 4, November 2018, hal. 235-247, 2 tabel, 9 gambar, 14 daftar pustaka

By conducting descriptive statistical analysis and the establishment of two econometric models, this study proves that the marginalization of women in the Indonesian labor market still occurs even though the quality of Indonesian women from the level of education and work participation is increasing. The phenomenon of marginalization of women is characterized by 1) the wage gap due to gender differences, namely the wages received by female workers are lower than male workers for all types of work; 2) the chances of men to find work are far higher than women in the Indonesian labor market. The study concludes that the wage gap due to gender differences is not due to competition in the labor market but rather due to the assumption that working women are secondary and supplementary breadwinners in their households, and the role that they can play is only an extension of their domestic role. Thus, the main cause of the marginalization of women in the labor market is the low awareness of gender equality, something which has already taken root in Indonesia.

Keywords: marginalization of women, labor market, wage gap, gender inequality

Dengan melakukan analisis statistik deskriptif dan pembentukan dua model ekonometrika, studi ini membuktikan bahwa marginalisasi perempuan dalam pasar tenaga kerja Indonesia masih terjadi meskipun kualitas perempuan Indonesia dari tingkat pendidikan dan partisipasi kerja makin meningkat. Fenomena marginalisasi perempuan ditandai dengan 1) kesenjangan upah akibat perbedaan gender yang makin tinggi yakni upah yang diterima oleh pekerja perempuan lebih rendah daripada pekerja laki-laki untuk semua jenis pekerjaan; 2) peluang laki-laki untuk bekerja jauh lebih tinggi daripada perempuan di pasar tenaga kerja Indonesia. Studi pustaka menyimpulkan bahwa kesenjangan upah akibat perbedaan gender bukan disebabkan persaingan di pasar tenaga kerja tetapi lebih disebabkan adanya anggapan bahwa perempuan yang bekerja adalah pencari nafkah sekunder dan pelengkap di rumah tangganya dan peran yang dapat dimainkan hanyalah perpanjangan peran domestiknya. Dengan demikian, akar masalah dari marginalisasi perempuan di pasar tenaga kerja adalah rendahnya kesadaran akan kesetaraan gender dan ini telah mengakar di Indonesia.

Kata kunci: marginalisasi perempuan, pasar tenaga kerja, kesenjangan upah, ketidakadilan gender

---

<sup>1</sup>Atnike Nova Sigiro, <sup>2</sup>Alfindra Primaldhi & <sup>3</sup>Bagus Takwin (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia & <sup>2</sup>Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Depok, Indonesia & <sup>3</sup>Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Depok, Indonesia)

**Ekonomi Perawatan dan Beban Kerja Ibu Rumah Tangga di Indonesia**

***Care Economy and the Burden of Housewives' Work in Indonesia***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 4, November 2018, hal. 249-258, 1 tabel, 8 gambar, 12 daftar pustaka

Social reproduction role by women are mostly unpaid, which are done in the context of social relation within household or family. In the context of macro economy, care work for family are often overlooked, furthermore are often not being considered as productive work that contribute to the economy. This situation bring overburden to women and the lack of appreciation toward care work in Indonesia. This article was written based on a national survey conducted in 2018 in 34 provinces in Indonesia. The survey measured the care work's burden of housewives, and public perception towards care economy that are run by housewives in Indonesia.

Keywords: care work, care economy, social reproduction, housewives

Peran reproduksi sosial yang dijalankan oleh perempuan sebagian besar merupakan kerja tidak berbayar (*unpaid*) yang dilakukan dalam kerangka relasi sosial seperti rumah tangga atau keluarga. Dalam konteks ekonomi makro, kerja perawatan (*care work*) di dalam keluarga ini masih luput dari perhitungan, bahkan tidak dianggap sebagai kerja produktif yang memiliki kontribusi terhadap ekonomi. Hal ini berdampak pada beban kerja yang terlalu besar kepada perempuan dan kurangnya penghargaan kepada kerja perawatandi Indonesia. Artikel ini berangkat dari hasil survei nasional tahun 2018 di 34 provinsi di Indonesia. Survei tersebut mengukur beban kerja perawatan ibu rumah tangga, dan persepsi masyarakat terhadap ekonomi perawatan yang dilakukan oleh ibu rumah tangga di Indonesia.

Kata kunci: kerja perawatan, ekonomi perawatan, reproduksi sosial, ibu rumah tangga



## Menakar Otonomi Perempuan Kepala Keluarga dalam Kegiatan Simpan Pinjam di Sebuah Lembaga Keuangan Mikro

### *Measuring the Autonomy of Female Family Heads in Savings and Loans Activities at a Microfinance Institution*

**Linda Yuliantini**

Program Studi Kajian Gender, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia  
Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta Pusat 10430 Indonesia

[linda.yuliantini@gmail.com](mailto:linda.yuliantini@gmail.com)

Kronologi Naskah: diterima 1 Oktober 2018, direvisi 29 Oktober 2018, diputuskan diterima 27 November 2018

#### Abstract

It is important to study the autonomy of women's autonomy, because it is relational, multidimensional and influences the lives of women, especially regarding actions and decision-making in all aspects of their lives. This research explores the autonomy of female household heads (PEKKA) in savings and loan activities at a microfinance institution both individually and collectively. Pekka's individual autonomy is seen in the context of power through *power within*, *power to*, and *power over*, while collective autonomy is in line with the *power with* concept offered by Linda Mayoux. This study uses a qualitative approach with a female perspective. Data collection was conducted through in-depth interviews with five subjects that were selected purposively. The results showed that participation in savings and credit activities increased the autonomy of individual female heads of household more significantly compared to collective autonomy in groups.

Keywords: female head of household, individual autonomy, collective autonomy, savings and loans

#### Abstrak

Otonomi perempuan penting untuk dikaji, karena bersifat relasional, multidimensi serta berpengaruh terhadap kehidupan perempuan terutama terkait tindakan dan pengambilan keputusan dalam segala aspek kehidupan mereka. Penelitian ini menggali otonomi perempuan kepala keluarga dalam kegiatan simpan pinjam di sebuah lembaga keuangan mikro baik secara individu maupun kolektif. Otonomi individu Pekka dilihat dalam konteks kekuasaan melalui *power within*, *power to*, dan *power over*, sedangkan otonomi kolektif sejalan dengan konsep *power with* yang ditawarkan oleh Linda Mayoux. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif perempuan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap lima subjek yang dipilih secara *purposive*. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi dalam kegiatan simpan pinjam meningkatkan otonomi individu perempuan kepala keluarga secara lebih signifikan dibandingkan dengan otonomi kolektif dalam kelompok.

Kata kunci: perempuan kepala keluarga, otonomi Individual, otonomi kolektif, simpan pinjam

#### Pendahuluan

Ikut kelompok ini karena terdesak kebutuhan sehari-hari, utang ke sana sini, harus gali lubang tutup lubang, kadang ke rentenir tetapi bayar harian, kalau ke koperasi ini mah tiap satu minggu bayarnya, terus kudu hadir tiap minggu itu. (OM 2018, wawancara 5 Mei).

Kutipan di atas merupakan penuturan OM, anggota kelompok simpan pinjam di sebuah desa di Sumedang, Jawa Barat. Ia mengikuti kelompok simpan pinjam sejak 2015 karena terdesak kebutuhan sehari-hari. Ia pernah memiliki banyak utang dan terjebak rentenir yang datang ke desa-desa menawarkan pinjaman dengan bunga yang cukup tinggi. Dalam kelompok tersebut, sebanyak

sepuluh perempuan bergabung untuk mendapatkan pinjaman dari koperasi yang dibentuk oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemberian pinjaman bertujuan memberdayakan ekonomi perempuan prasejahtera di desa melalui kegiatan usaha atau pengembangan usaha dengan sistem pembayaran tiap satu minggu sekali selama satu tahun. Metode pembayaran angsuran ditentukan berdasarkan kesepakatan, prinsip tanggung renteng diberlakukan kepada kelompok untuk menutup kekurangan anggota lain yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran.

Pernyataan OM di atas memperlihatkan upaya perempuan memanfaatkan kredit untuk usaha produktif seperti berdagang sebagai salah satu cara

menjaga kelangsungan hidup dan keluarganya. OM tidak sendirian, dalam kelompok simpan pinjam yang diikutinya, terdapat perempuan-perempuan dengan kondisi hampir sama. Dalam prosesnya, tidak jarang dalam kelompok tersebut menemui berbagai kendala dan persoalan seperti anggota yang kesulitan mengembalikan pinjaman berikut jasa yang dibebankan karena berbenturan dengan kebutuhan hidup lainnya.

David Mosse berargumen dalam artikelnya yang berjudul "A Relational Approach to Durable Poverty, Inequality and Power" bahwa relasi kemiskinan dapat dipahami sebagai pandangan yang menganggap kemiskinan hadir karena kelompok yang miskin dikontrol oleh kekuasaan di sekitarnya serta sebagai akibat dari adanya relasi sosial yang sedemikian rupa di masyarakat. Mosse juga berpandangan bahwa kemiskinan seharusnya dilihat dari keterkaitan antara sistem sosial, politik dan sistem budaya, daripada hanya berfokus pada karakteristik kelompok miskin semata (2010, h. 1158). Dalam konteks ini, Perempuan kerap kali mengalami kemiskinan berlapis dan menjadi bagian dari kelompok yang dimiskinkan sebagai akibat dari berkembangnya kapitalisme pasar global, ditambah adanya kategorisasi sosial di masyarakat.

Persoalan kemiskinan dan perempuan seolah tidak ada habisnya, sehingga kemiskinan sering disebut "berwajah perempuan" (Hartini 2012, h. 67). Terbatasnya akses perempuan pada kegiatan-kegiatan produktif dan terus-menerus dibebani kegiatan reproduktif membuat perempuan semakin miskin dan terpuruk. Persoalan ekonomi yang dihadapi perempuan tidak bisa dilepaskan dari kemiskinan. Hartini (2012, h. 65) mengungkapkan bahwa persoalan yang dihadapi perempuan Indonesia umumnya berkaitan dengan sumber daya dan posisi tawar perempuan yang rendah.

Permasalahan yang dihadapi perempuan kepala keluarga sama seperti persoalan perempuan miskin lainnya dengan faktor penyebab dan kendala yang beragam. Kendala tersebut diantaranya keterbatasan akses perempuan atas pendidikan, keterbatasan ekonomi, pengambilan keputusan, keterlibatan dalam organisasi dan lain sebagainya. Budaya tradisional yang menganut ideologi patriarki serta adanya ketimpangan gender dalam seluruh aspek kehidupan merupakan penyebab utama yang menghantarkan perempuan pada kemiskinan yang berkepanjangan dan bahkan berulang (Yuliantini 2018, h. 9).

Berdasarkan data Susenas 2009-2017 yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 terdapat 15,17 persen rumah tangga di Indonesia yang dikepalai oleh

perempuan (BPS 2018). Menurut Ratna Batara Munti (1999, h. 5) peningkatan jumlah perempuan sebagai kepala keluarga disebabkan oleh krisis ekonomi di masyarakat. Krisis ekonomi paling berat dirasakan perempuan yang harus mengelola kebutuhan keluarga. Sulitnya kehidupan perempuan yang menjadi kepala keluarga juga terlihat dari data yang dihimpun oleh PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) melalui Survei Sistem Pemantauan Kesejahteraan Berbasis Komunitas (SPKKB). Data tersebut menunjukkan sebanyak 49 persen keluarga yang dikepalai oleh perempuan berada dalam kesejahteraan paling rendah (Seknas PEKKA 2015, h.1).

Rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan umumnya miskin dan merupakan kelompok termiskin dalam tingkat sosial ekonomi di Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan rendahnya kualitas sumber daya perempuan kepala keluarga. Mereka berusia antara 20 hingga 60 tahun, lebih dari 38,8 persen buta huruf dan tidak pernah mengenyam pendidikan sekolah dasar. Mereka juga menanggung antara satu hingga enam orang anggota keluarga, sebagian dari mereka bekerja sebagai buruh tani dan atau pada sektor informal dengan pendapatan rata-rata kurang dari Rp10.000 per hari, sebagian dari mereka juga mengalami trauma karena kekerasan yang dialami dalam rumah tangga maupun negara (Seknas PEKKA 2010, h.6).

Berbagai jenis program keuangan mikro saat ini berfokus pada perempuan. Program tersebut dibuat mulai dari skala kecil berdasarkan kelompok swadaya hingga simpan pinjam berskala besar berupa lembaga dengan target pengentasan kemiskinan. Umumnya, lembaga-lembaga tersebut bertujuan untuk memberdayakan perempuan secara ekonomi melalui pinjaman kredit yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha atau pengembangan usaha. Lembaga keuangan mikro tersebut salah satunya berwujud koperasi. Dalam pandangan Hancock (2001 dikutip dalam Ikasari 2003, h. 1), pemberdayaan ekonomi pada perempuan di tingkat akar rumput ini diasumsikan oleh beberapa pihak akan memengaruhi kekuasaan perempuan serta menaikkan otonomi maupun status sosial mereka sebagai pengambil keputusan dalam rumah tangga. Meskipun dalam pelaksanaannya hal tersebut belum tentu benar adanya.

Hotze Lont (2001 dikutip dalam Srimulyani 2013, h. 99) menyatakan kredit tidak selalu memiliki kontribusi pada otonomi perempuan atau terhadap upaya pemberdayaan perempuan. Ini disebabkan kredit digunakan untuk tujuan konsumsi, yang disebutnya dengan "membelanjakan uang (*shopping money*), maka tidak banyak otonomi yang akan

didapatkan. Akan tetapi apabila hal tersebut digunakan untuk tujuan yang produktif, maka akan mendatangkan lebih banyak peran dan tanggung jawab bagi perempuan selain hanya mengurus pekerjaan domestik (Yuliantini 2018, h. 5).

Otonomi bersifat relasional dengan beragam dimensi serta dapat memengaruhi kehidupan perempuan, sehingga penting untuk menggali otonomi serta dampaknya terhadap kehidupan perempuan itu sendiri. Pamela L. Barrios (2012, h. 18) dalam studinya yang berjudul *Relationship Between Household Structure, Maternal Autonomy and Undernutrition in Brazilian Children* mengungkapkan bahwa otonomi merupakan konsep yang multidimensi yang mencakup empat elemen kunci yakni kapasitas dalam pengambilan keputusan baik di dalam maupun di luar rumah, mobilitas fisik di luar rumah, kebebasan secara finansial, serta sikap yang dimiliki terhadap tindak kekerasan domestik.

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini menggali bagaimana perempuan kepala keluarga membangun otonominya baik secara individu maupun kelompok terkait keterlibatan mereka dalam kelompok simpan pinjam di sebuah lembaga keuangan mikro di salah satu desa di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif perempuan melalui studi kasus. Pendekatan ini dianggap mampu menggali temuan secara mendalam dan detail. Pendekatan kualitatif digunakan dalam rangka menggali pengalaman perempuan kepala keluarga terkait keterlibatannya dalam kelompok simpan pinjam. Pendekatan ini dipakai untuk menemukan bagaimana terjadinya proses peningkatan otonomi para perempuan subjek penelitian yang dipaparkan secara lengkap melalui pandangan dan tutur kata mereka yang hidup di perdesaan. Saya menggunakan pendekatan ini untuk menelusuri tidak hanya tindakan-tindakan sosial yang dilakukan perempuan kepala keluarga dalam upaya membangun otonominya, tetapi juga "diharapkan mampu menangkap makna subjektif dari tindakan yang dilakukan oleh diri subjek sendiri" (Sarantakos 1997 dikutip dalam Poerwandari 2017, h. 26).

Studi kasus dipakai untuk menelaah kasus spesifik tentang perempuan kepala keluarga dalam membangun otonominya baik secara individu maupun keterlibatannya dalam kelompok simpan pinjam. Dengan demikian saya dapat memperoleh pemahaman yang utuh serta terintegrasi antar hubungan dari berbagai fakta dan

dimensi dari kasus yang secara khusus terjadi pada perempuan kepala keluarga tersebut (Poerwandari 2017, h. 125). Wawancara mendalam dilakukan terhadap lima subjek yang dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling*. Para informan dipilih berdasarkan karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian dan memiliki kapasitas serta informasi yang cukup untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kelima subjek tersebut yakni OM (24 tahun, menikah), VP (24 tahun, menikah, istri kedua), CC (36 tahun, janda), LS (39 tahun, janda), serta ID (48 tahun, janda).

Berbagai profesi sampingan dikerjakan para subjek tersebut seperti menjadi pekerja rumah tangga, pedagang, petani dan pekerja seks komersial. Pekerjaan tersebut mereka lakukan untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan keluarga. Adapun kegiatan usaha yang dijalankan dari pinjaman kredit tidak mampu menopang hidup dan kebutuhan sehari-hari keluarga mereka, sehingga mereka harus membanting tulang memenuhi segala kebutuhan termasuk membayar utang dan angsuran koperasi. Kelindan kompleksitas persoalan yang dihadapi perempuan kepala keluarga ini tidak hanya bersifat struktural tetapi juga kultural baik yang muncul dari keluarga, masyarakat maupun sistem kredit yang diberlakukan koperasi itu sendiri.

## Perempuan Kepala Keluarga, Otonomi dan Agensi

Keberadaan perempuan kepala keluarga merupakan fakta kontradiktif dalam tatanan nilai masyarakat patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga. Sebagai sebuah konsep, perempuan sebagai kepala keluarga belum dapat diterima secara luas oleh masyarakat, mereka masih dikategorikan sebagai kaum marginal dan dipandang sebelah mata karena istilah perempuan kepala keluarga masih terasa asing dan belum dapat diterima secara penuh oleh masyarakat. Perempuan masih sering mengalami diskriminasi dan berbagai bentuk ketidakadilan gender seperti marginalisasi, subordinasi, kekerasan, stereotip, dan multibeban (Fakih 2013, h. 12-22).

Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 31 secara tegas menyebutkan laki-laki sebagai kepala keluarga. Makna tersebut begitu melekat dalam sistem tatanan sosial dan budaya dalam masyarakat yang umumnya masih menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Faktanya di dalam masyarakat terdapat perempuan yang bertindak sebagai kepala keluarga karena berbagai alasan. Pada kenyataannya banyak perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga

serta menafkahi keluarga atau bisa disebut sebagai perempuan kepala keluarga. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab perempuan menjadi kepala keluarga diantaranya suami meninggal dunia, bercerai, ditinggal pergi, atau suami berpoligami. Lebih jauh Saptari dan Holzner (2016, h. 39) berpendapat bahwa rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan bisa terdiri dari perempuan yang belum kawin, janda atau cerai, atau bahkan suami/laki-lakinya pergi karena migrasi keluar.

Sementara itu otonomi memiliki beragam makna yang diramu oleh banyak ahli. Ihromi (1995 dikutip dalam Ikasari 2003, h. 23) menyatakan otonomi merupakan kemampuan untuk bertindak dan mengambil keputusan berdasarkan kemauan sendiri, bukan karena diperintah atau dipaksa oleh orang lain. Otonomi dapat berasal dari individu maupun kolektif yang muncul baik dalam diri seseorang maupun kelompok untuk tujuan yang ingin dicapai secara bersama.

Pandangan serupa dikemukakan Leacock (1978) yang memaknai otonomi perempuan sebagai kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan terkait kehidupan serta aktivitas yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Perempuan miskin dikatakan otonom dalam rumah tangganya apabila memiliki penghasilan sendiri atau menerima penghasilan dari suami, akan tetapi dapat membeli sesuatu yang diinginkannya tanpa seizin suami. Ia juga ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan terkait urusan rumah tangga seperti sekolah anak atau membangun rumah. Para perempuan miskin yang memiliki otonomi juga memiliki kebebasan untuk menolak jika suami meminta uang atau perhiasannya, mampu menghindari kekerasan yang dilakukan oleh suaminya termasuk mampu menolak hubungan badan apabila tidak menginginkannya (Ikasari 2003, h. 82). Dengan demikian, otonomi perempuan merupakan kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan terbaik bagi dirinya sendiri tanpa pengaruh dari orang lain.

Para ahli memiliki pandangan jika agensi memiliki pengertian yang serupa dengan otonomi dan pemberdayaan. Narayan (2005 dikutip dalam Ibrahim & Sabina 2007, h. 6) berargumen bahwa konsep pemberdayaan terkait dengan istilah-istilah seperti agensi, otonomi, pengarahan diri, penentuan nasib sendiri, pembebasan, partisipasi, mobilisasi, dan kepercayaan diri. Konsep tersebut menjadi penting untuk memahami otonomi perempuan yang berkaitan dengan pemberdayaan. Keterkaitan ketiga konsep di atas sejalan dengan pandangan Amartya Sen (1999 dikutip dalam Mishra & Tripathi 2011, h. 59) berikut ini.

*Women's agency is an important constituent of women's empowerment. Women's agency can be said to be operative when it results in a fundamental shift in perceptions, or "inner transformation" so that women are able to define self-interest and choice, and consider themselves as not only able, but entitled to make choices.* (Agensi perempuan merupakan unsur penting dari kekuatan perempuan, agensi dapat dikatakan berjalan ketika menghasilkan pergeseran mendasar dalam persepsi, atau "transformasi batin" sehingga perempuan dapat mendefinisikan kepentingan dan pilihan pribadi, dan menganggap diri mereka tidak hanya mampu, namun berhak membuat pilihan).

Argumen lain ditambahkan Shireen J Jejeebhoy (2000 dikutip dalam Mishra & Tripathi 2011, h. 59) agensi mencakup kemampuan untuk merumuskan pilihan strategis, dan mengendalikan sumber daya serta keputusan yang memengaruhi hasil kehidupan yang penting. Oleh karenanya, agensi harus dianggap sebagai esensi dari pemberdayaan dan sumber daya serta kondisi dan hasil yang terus-menerus dicapai secara teratur oleh individu. Agensi dan pemberdayaan memiliki keterkaitan erat, pun demikian hubungannya dengan otonomi perempuan, ketiganya memiliki kaitan dan banyak digunakan dalam kepustakaan pembangunan. Dengan demikian, secara singkat agensi dapat dimaknai sebagai kemampuan perempuan baik secara individu maupun kolektif untuk bertindak dan melakukan sesuatu guna mencapai tujuan yang diinginkan (Yuliantini 2018, h. 27).

#### *Otonomi Individual Perempuan Kepala Keluarga*

Catriona Mackenzie (dikutip dalam Veltman & Piper 2014, h. 17) menyebutkan terdapat tiga dimensi otonomi yang saling berkaitan yakni *self-determination*, *self-governance*, dan *self-authorization*. *Self-determination* dimaknai sebagai kebebasan dan kesempatan untuk membuat serta menetapkan pilihan hidup seseorang. *Self-governance* merupakan keterampilan dan kapasitas yang diperlukan untuk membuat pilihan dan keputusan yang mengekspresikan identitas seseorang. Sementara *self-authorization* merupakan otoritas atau wewenang untuk menentukan nasib, mengatur serta mengontrol dirinya sendiri.

Konsep otonomi dapat ditelusuri melalui tulisan Linda Mayoux yang berjudul "Women's Empowerment and Micro-Finance Programmes: Strategies for Increasing Impact" (1998). Mayoux memaparkan otonomi yang dikaitkan dengan pemberdayaan dalam diri perempuan yakni perubahan internal individu (*power within*), peningkatan kapasitas (*power to*), *power over* serta mobilisasi kolektif perempuan (*power with*).

*Power within* dimaknai sebagai kekuatan yang berasal dari dalam diri seseorang atau kehendak serta kemauan untuk berubah. *Power to* mengacu pada peningkatan kapasitas pada individu perempuan, kekuatan ini berkaitan dengan otoritas dalam pengambilan keputusan juga kekuatan untuk memecahkan masalah. Sementara *power over* dimaknai sebagai pengurangan hambatan untuk perubahan pada tingkat rumah tangga dan masyarakat. Elemen *power with* (kekuatan dengan) mengacu pada peningkatan solidaritas antar perempuan untuk perubahan pada tingkat rumah tangga, komunitas serta level makro. Kekuatan *power with* ini melibatkan kekuatan sekumpulan orang yang memiliki tujuan dan pemahaman yang sama untuk mencapai tujuan bersama (Mayoux 1998, h. 238).

Senada dengan argumen Mayoux, Oxaal dan Badeen (1997 dikutip dalam Julie L Drolet 2005, h. 99) menyebut bahwa kekuasaan (*power*) merupakan akar dalam istilah pemberdayaan. Mayoux mengaitkan kekuatan/kekuasaan dalam diri perempuan yang mencakup *power to* dan *power within* ini dengan tiga unsur yang saling terkait yakni meningkatkan kemampuan dan sumber daya, kepercayaan diri dan keteguhan perempuan, kesadaran dan aspirasi untuk berubah, serta peningkatan otonomi dan kemauan untuk membuat keputusan bagi diri sendiri dan orang lain.

Berkaitan dengan elemen *power to* dalam keuangan mikro, perempuan memiliki kekuasaan atau kekuatan dalam peningkatan akses terhadap pendapatan, aset produktif serta properti rumah tangga. Sementara elemen *power over* dalam konteks keuangan mikro dipahami sebagai kontrol terhadap penggunaan pinjaman kredit dan penghasilan yang didapat dari pinjaman kredit, serta kegiatan produktif dalam rumah tangga. Pada tingkatan *power with*, kelompok simpan pinjam merupakan sebuah wadah organisasi dalam menciptakan perubahan bagi perempuan anggota kelompok. Mayoux menyoroti elemen *power with* dalam keuangan mikro antara lain meningkatkan dukungan pada saat krisis atau untuk memilih strategi dalam menantang ketidaksetaraan gender, partisipasi dalam mengambil tindakan untuk membela perempuan lain dari kekerasan dalam rumah tangga dan masyarakat, serta partisipasi dalam gerakan untuk menentang subordinasi gender yang terjadi dalam komunitas dan tingkat makro (Mayoux 1998, h. 238).

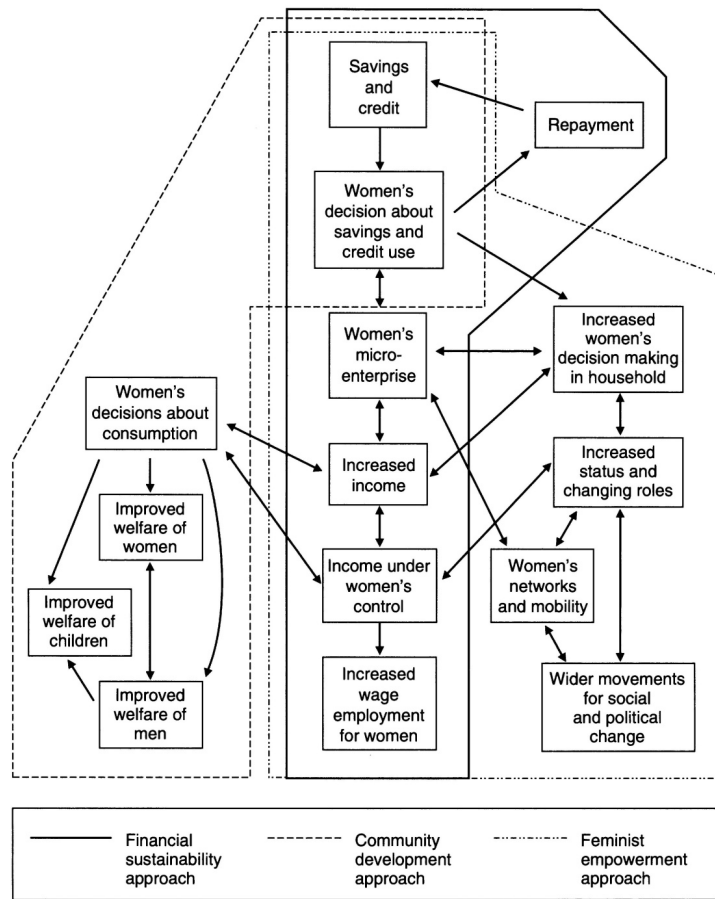
Dalam artikel berjudul "Women's Autonomy in India and Pakistan: The Influence of Religion and Region", Shireen J Jejeebhoy dan Zeba A Sathar (2001)

mengungkapkan pandangan yang senada dengan Mayoux. Mereka menggali otonomi perempuan berdasarkan empat dimensi yang saling terkait yakni pengambilan keputusan terkait ekonomi, mobilitas fisik, kebebasan dari ancaman suami, serta akses dan kontrol pada sumber daya ekonomi (Jejeebhoy & Sathar 2001, h. 698). Otoritas pengambilan keputusan dalam tiga kegiatan ekonomi meliputi partisipasi perempuan dalam kegiatan rutin dan pengambilan keputusan terkait hal yang besar, partisipasi tanpa terlibat secara penuh dalam pengambilan keputusan, dan kepemilikan suara terkait pembelian makanan untuk konsumsi sehari-hari, pembelian barang-barang rumah tangga termasuk perhiasan.

Indeks mobilitas fisik diukur dari tingkat perempuan dapat melakukan aktivitas di luar rumah misalnya pergi ke layanan kesehatan, pusat komunitas di desa atau pasar, mengunjungi rumah tetangga dan kerabat juga tempat-tempat lainnya tanpa mendapat larangan dari orang lain. Indeks kebebasan dari rasa takut terhadap suami digunakan untuk melihat kontinum hubungan kekuasaan antar pasangan. Sementara indeks akses dan kontrol atas sumber daya ekonomi mencakup dua aspek yakni penggunaan sumber daya yang berasal dari keluarga dan sumber daya yang dimiliki perempuan sendiri. Beberapa indikator tersebut juga digunakan untuk melihat otonomi diri dan otonomi Pekka dalam hubungannya dengan keluarga dan orang lain, baik yang berkaitan dengan aspek ekonomi maupun nonekonomi seperti dapat dilihat pada Tabel 1 di bagian selanjutnya.

Otonomi individu diperlukan untuk melihat otonomi perempuan secara keseluruhan yang berkaitan dengan kekuasaan, kontrol terhadap sumber daya serta pengambilan keputusan terbaik bagi dirinya sendiri. Moore (1998 dikutip dalam Ikasari 2003, h. 25) menguraikan bahwa peran perempuan sebagai individu dalam sebuah program diperlukan untuk melihat apakah perempuan memiliki wewenang untuk mengontrol sumber daya yang tersedia atau memiliki akses terhadap sumber daya tersebut. Selanjutnya Moore juga berargumen akan pentingnya melihat perempuan sebagai individu dan fungsi perempuan dalam masyarakat bukan sebagai objek tetapi sebagai individu dengan kekuasaan tertentu (Ikasari 2003, h. 25).

Lebih jauh, Mayoux memaparkan pemberdayaan perempuan dan keuangan mikro dalam skema pendekatan yang dinamakan *virtuous spiral* berikut ini.



**Figure 1: Virtuous spirals: approaches compared**

Sumber: Virtuous Spiral Approach (Mayoux 1998, h. 237)

Gambar 1 di atas merupakan bagan pendekatan yang ditawarkan oleh Linda Mayoux terkait pemberdayaan bagi perempuan dan keuangan mikro yang terdiri dari pendekatan kesinambungan keuangan (*financial sustainability approach*), pendekatan pengembangan masyarakat (*community development approach*), serta pendekatan pemberdayaan feminis (*feminist empowerment approach*). Ketiga pendekatan tersebut saling berkaitan, tetapi masing-masing memiliki logika sendiri dan berfokus pada bagian-bagian yang berbeda sehingga mengarah pada penekanan kebijakan yang berbeda pula (Mayoux 1998, h. 236).

Pendekatan kesinambungan keuangan terkait dengan individu dan ekonomi khususnya peningkatan pendapatan termasuk kontrol terhadap pendapatan tersebut dan berkontribusi terhadap pemberdayaan sosial dan politik. Tujuan utama pendekatan ini yakni pengembangan program keuangan mikro yang berkelanjutan secara finansial, yang sering difokuskan pada pengusaha dari kalangan miskin. Pendekatan pengembangan masyarakat mendefinisikan

pemberdayaan dalam hal kemandirian masyarakat dan penurunan kerentanan. Tujuan utama keuangan mikro adalah untuk mengentaskan kemiskinan kaum termiskin dan menyediakan titik masuk bagi mobilisasi masyarakat. Pendekatan ketiga yakni pendekatan pemberdayaan feminis memandang pemberdayaan sebagai transformasi hubungan gender dan kelas. Tujuan utama keuangan mikro adalah titik awal untuk mobilisasi kaum feminis (Mayoux 1998, h. 236).

Berdasarkan bagan tersebut, idealnya program simpan pinjam dapat meningkatkan kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan atas penggunaan uang kredit dan dapat meningkatkan pendapatan perempuan. Mereka diharapkan juga memiliki kontrol terhadap pendapatan itu sendiri serta dapat meningkatkan pekerjaan yang menghasilkan bagi perempuan. Di samping itu, kredit diharapkan dapat pula meningkatkan kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan rumah tangga, meningkatkan status serta perubahan terkait peran, jejaring dan mobilitas perempuan, serta gerakan untuk perubahan sosial dan politik yang lebih luas.

### Otonomi Kolektif Perempuan Kepala Keluarga

Mosse (1996 dikutip dalam Ikasari 2003, h. 145) berargumen ketika perempuan membentuk kelompok kecil dan saling berhubungan akan menumbuhkan keyakinan dalam diri mereka untuk ikut ambil bagian secara bersama, sehingga perempuan-perempuan tersebut dapat memahami kapasitas mereka untuk menentukan kepentingan mereka sendiri. Keterlibatan perempuan dalam kelompok dapat berkontribusi pada peningkatan kepercayaan diri dan ikut ambil bagian dalam kegiatan sosial.

World Bank meramu pengertian otonomi kolektif perempuan sebagai berikut:

*Women can influence their environments through their participation in informal associations and through collective action, but their success depends in part on their individual ability to make effective choices* (Perempuan dapat memengaruhi lingkungan melalui partisipasi mereka dalam perkumpulan informal dan melalui tindakan kolektif, namun keberhasilan mereka bergantung pada kemampuan individual mereka untuk membuat pilihan yang efektif) (World Bank 2012, h. 151).

Artinya otonomi individu perempuan memiliki pengaruh bagi lingkungan perempuan itu sendiri melalui

kontribusi mereka dalam kegiatan berkelompok secara informal. Perempuan dapat menentukan kepentingan mereka secara bersama-sama berdasarkan kemampuan individu dalam kelompok tersebut. Dengan kata lain otonomi individu sangat berpengaruh bagi keberhasilan otonomi kolektif perempuan dalam sebuah kelompok. Keduanya saling berhubungan, tetapi otonomi individual tidak selalu berbanding lurus dengan otonomi kolektif, tergantung pada sejauh mana para perempuan mampu mengembangkan kapasitas dan kesadaran kritis mereka.

### Otoritas Diri Perempuan Kepala Keluarga

Capaian otonomi individual perempuan yang diuraikan pada Tabel 1 di bawah didasarkan pada beberapa hal seperti kepercayaan dan kebanggaan diri, posisi tawar, serta pengambilan keputusan dalam keluarga termasuk pengelolaan anggaran rumah tangga. Semua unsur tersebut memenuhi kriteria tiga elemen kunci yang ditawarkan oleh Mayoux yakni *power within*, *power to* dan *power over*. Berdasarkan temuan lapangan, otonomi individu perempuan kepala keluarga ditelusuri melalui aspek ekonomi dan nonekonomi seperti tergambar dalam tabel berikut:

**Tabel 1 Capaian Otonomi Individu Perempuan Kepala Keluarga (Pekka)**

Otonomi Diri dan Otonomi Pekka dalam Keluarga	Aspek Ekonomi					Aspek Nonekonomi				
	Subjek					Subjek				
	OM	VP	CC	LS	ID	OM	VP	CC	LS	ID
Membuat keputusan dalam rumah tangga termasuk penggunaan anggaran	Memiliki akses dan kontrol terhadap pengaturan keuangan	Memiliki akses dan kontrol terhadap pengaturan keuangan	Memiliki akses dan kontrol terhadap pengaturan keuangan	Memiliki akses dan kontrol terhadap pengaturan keuangan	Memiliki akses dan kontrol terhadap pengaturan keuangan	Keputusan dalam rumah tangga dibuat oleh subjek dan suaminya	Keputusan dalam rumah tangga dibuat oleh subjek sendiri	Keputusan dalam rumah tangga dibuat oleh subjek sendiri	Keputusan dalam rumah tangga dibuat oleh subjek sendiri	Keputusan dalam rumah tangga dibuat oleh subjek sendiri
Posisi tawar perempuan kepala keluarga dengan orang lain	mengatur pendapatan dan penggunaan anggaran rumah tangga	Dapat menolak ketika suami meminjam uang pinjaman kredit	Mengatur pendapatan dan penggunaan anggaran rumah tangga	Mengatur pendapatan dan penggunaan anggaran rumah tangga	Mengatur pendapatan dan penggunaan anggaran rumah tangga	Dapat menegosiasikan pengasuhan anak dengan suami apabila subjek sedang bekerja	Dapat menegosiasikan pengasuhan anak dengan suami sedang menginap di rumah VP (suami memiliki waktu bergilir antara istri pertama dan istri kedua/VP)	Dapat menegosiasikan pemakaian kondom ketika melakukan hubungan seksual dengan klien dan kekasih	Dapat menolak ketika ada yang mengajak melakukan hubungan seksual di tempat kerja	Memutuskan bercerai karena tidak mau dipoligami  Dapat menolak ajakan orang yang memintanya berhubungan seksual sebagai balasan atas bantuan membayarkan utang

Sumber: Diolah dari hasil wawancara

Tabel di atas menunjukkan peningkatan otonomi individu Pekka terlihat pada beberapa subjek, sementara pada subjek yang lain tidak terlihat secara signifikan. Terdapat perubahan pada otonomi para subjek yang ditelusuri berdasarkan aspek ekonomi misalnya dalam pengelolaan anggaran rumah tangga. Meskipun bukan perubahan yang signifikan, tetapi terjadi peningkatan otonomi individu Pekka terkait keterlibatan mereka dalam kegiatan simpan pinjam. Perubahan otonomi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Pekka yang memiliki suami cenderung mendapat pengaruh dari suami. Ini berbeda dengan Pekka yang berstatus sebagai janda yang memiliki kebebasan dalam hal apapun secara independen. Meskipun demikian, pada saat-saat tertentu Pekka bersuami dapat menegosiasikan atau bahkan menolak permintaan suami atau kekasih terkait sejumlah hal termasuk dalam hubungan seksual serta memutuskan untuk bercerai karena menolak dipoligami.

Pada aspek nonekonomi, otonomi subjek terlihat pada kemampuan menolak melakukan hubungan seksual di tempat kerja misalnya LS yang bekerja di kafé, atau ID yang menolak ajakan berhubungan seksual dari laki-laki yang membantunya membayarkan utang. Begitupun dengan CC, pekerjaan sampingan sebagai pekerja seks komersial (PSK) ia lakukan demi menutupi kebutuhan hidup sehari-hari bagi dirinya dan ketiga anaknya karena usaha berjualan gorengan, lontong, dan makanan kecil yang ia jalankan tidak membuahkan hasil. Ia juga masih harus membayar cicilan koperasi tiap minggu. CC mampu menegosiasikan penggunaan kondom kepada klien maupun kekasih meskipun beberapa klien menolaknya.

Cerita lain juga dituturkan OM dan VP, mereka dapat menegosiasikan pengasuhan anak ketika sedang melakukan pekerjaan sampingan ataupun berdagang, begitu pun ketika suami VP sedang berada di rumah. Meskipun demikian, para perempuan ini tetap lebih banyak melakukan pengasuhan. Terkadang VP melakukan pekerjaan sampingan menjadi PSK secara sembunyi-sembunyi untuk memenuhi kebutuhan anak, ibu dan dirinya.

Berdasarkan skema *virtuous spiral* yang dipaparkan Mayoux di atas, beberapa diantaranya sejalan dengan temuan lapangan yang digambarkan pada Tabel 1 mengenai capaian otonomi individu perempuan kepala keluarga terkait dengan pembuatan keputusan dalam rumah tangga serta posisi tawar mereka dalam relasinya dengan orang lain. Dengan demikian capaian tersebut hanya memenuhi unsur pendekatan kesinambungan

ekonomi para perempuan semata. Pada aspek nonekonomi, capaian tersebut memperlihatkan otonomi individu para Pekka yang berkaitan dengan kemampuan perempuan dalam melakukan negosiasi dengan pihak lain baik dalam relasinya dengan partner maupun non partner.

### **Kepercayaan dan Kebanggaan Diri Perempuan Kepala Keluarga**

Keberadaan perempuan secara kolektif dalam kelompok simpan pinjam memberikan kontribusi pada peningkatan kepercayaan diri dan menumbuhkan kebanggaan bagi mereka. Dari kelima subjek, empat diantaranya memiliki kepercayaan diri dan kebanggaan setelah bergabung dengan kelompok, salah satunya VP.

VP memimpin kelompok kecil yang terdiri dari lima orang anggota, ia memiliki kebanggaan dan kepercayaan diri yang cukup tinggi karena dapat memimpin dan menjadi kepercayaan anggota lain. Meskipun demikian tanggung jawab yang ia pikul cukup besar misalnya ketika ada anggota yang memakai uang setoran dan ada mekanisme tanggung renteng. Dengan bergabung dalam kelompok simpan pinjam, VP dapat mengenal anggota lain. Kelompok menumbuhkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dalam dirinya, ibarat pepatah tak kenal maka tak sayang, ungkapan tersebut benar adanya bagi VP. Meskipun bertetangga, mereka tidak terlalu akrab, tetapi semuanya berubah setelah menjadi bagian dalam kelompok. Mereka menjadi lebih dekat dan sering ngobrol meskipun untuk urusan seputar usaha yang dijalankan dan angsuran kredit.

Kemampuan ekonomi perempuan hanya terbatas dalam lingkup kelompok. Akses kredit bagi perempuan tersebut hanya membuat mereka terbantu sesaat untuk penyediaan modal usaha dengan sedikit keuntungan atau manfaat ekonomi yang mereka dapatkan tanpa mengubah posisi dan perannya dalam masyarakat. Dimensi pemberdayaan yang digambarkan dalam bagan Mayoux di atas dapat ditelusuri melalui status dan peran perempuan, jejaring dan mobilitas perempuan, serta gerakan untuk perubahan sosial dan politik berkaitan dengan otonomi kolektif perempuan dalam sebuah kelompok.

Berdasarkan temuan lapangan setelah bergabung dengan kelompok, para perempuan ini memiliki rasa kepemilikan yang cukup tinggi terhadap kelompoknya sendiri. Namun status, posisi, dan peran perempuan anggota kelompok belum mampu memengaruhi

kebijakan di level desa karena mereka berada pada lapisan sosial paling bawah dan di luar jaring-jaring pengaman di desa. Kelima informan tidak tergabung dan menggabungkan diri dalam organisasi formal seperti pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), atau pengurus posyandu. Seperti penuturan VP (2008, wawancara 7 April) berikut: "Dalam kelompok saya, tidak ada yang jadi anggota ataupun pengurus PKK dan sebagainya, apalagi ikut rapat-rapat desa, *teu aya nu ngajakan* (tidak ada yang mengajak)."

Partisipasi setiap individu dalam kelompok belum optimal karena motivasi keanggotaan dalam kelompok hanya dimaksudkan untuk mendapatkan pinjaman kredit. Belum ada kesadaran bahwa keberadaan dan kebersamaan mereka dalam kelompok tidak hanya untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang mereka hadapi tetapi juga mengatasi persoalan lain

secara bersama.

Buttler dan Wintram (1993 dikutip dalam Ikasari 2003, h. 159) berargumen bahwa interaksi individu dalam kelompok memiliki kontribusi dalam membangkitkan perasaan lebih berharga dan bahagia. Hal ini pula yang dituturkan CC (2018, 9 April) dalam wawancara. "*Muhun* (iya), semenjak gabung di kelompok, saya senang, banyak teman, suka ngobrol, *pokona aya kagiatan* (pokoknya ada kegiatan) gitu." CC awalnya jarang keluar rumah, kecuali ada yang harus dibeli ke warung. Akan tetapi semenjak bergabung dengan kelompok, ia mempunyai aktivitas lain yang membuatnya memiliki solidaritas dan kepercayaan diri untuk bersosialisasi meskipun dalam kelompok tidak banyak yang dibahas selain persoalan kredit dan seputar usaha yang dijalankan.

Untuk memahami capaian otonomi kolektif subjek penelitian, dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah.

**Tabel 2 Capaian otonomi kolektif perempuan kepala keluarga**

Capaian Otonomi Kolektif	Subjek					
	OM	VP	CC	LS	ID	
1. Keputusan mengikuti kelompok	<ul style="list-style-type: none"> <li>Awal mengikuti kelompok atas perintah suami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengikuti kelompok atas inisiatif sendiri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengikuti kelompok atas keinginan sendiri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengikuti kelompok atas inisiatif sendiri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengikuti kelompok atas inisiatif sendiri</li> </ul>	
2. Akses dan kontrol Perempuan dalam kelompok	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berani mengutarakan dan mempertahankan pendapat ketika ada persoalan dengan petugas koperasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berani mengutarakan dan mempertahankan pendapat ketika ada persoalan dengan petugas koperasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berani mengutarakan dan mempertahankan pendapat ketika ada persoalan dengan petugas koperasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki kontrol terhadap anggota kelompok</li> <li>Berani mengutarakan dan mempertahankan pendapat ketika ada persoalan dengan petugas koperasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berani mengutarakan pendapat</li> <li>Berani mengutarakan dan mempertahankan pendapat ketika ada persoalan dengan petugas koperasi</li> </ul>	
3. Keuntungan mengikuti kelompok simpan pinjam	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendapatkan modal usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendapatkan modal usaha</li> <li>Mengenal anggota lainnya</li> <li>Menambah solidaritas</li> <li>Meningkatkan Kepercayaan Diri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendapatkan banyak teman, dapat berkumpul dengan anggota lain</li> <li>Meningkatkan Kepercayaan Diri dan kebanggaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat berkumpul dengan perempuan lainnya</li> <li>Meningkatkan Kepercayaan Diri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendapatkan pinjaman untuk bayar utang</li> <li>Meningkatkan Kepercayaan Diri</li> </ul>	

Sumber: Diolah dari hasil wawancara

Kelompok yang ditentukan dan dibentuk sebagai persyaratan mendapatkan kredit, tidak memberikan akses bagi perempuan dalam kelompok untuk mandiri dan meningkatkan kapasitas. Ini dikarenakan tidak ada pelatihan yang secara kontinu diberikan oleh pihak koperasi. Meskipun dengan pemberian kredit diharapkan usaha yang dijalankan perempuan dapat berkembang dan dapat meningkatkan kesejahteraan para perempuan tersebut. Namun demikian, keberadaan kelompok telah memberikan kesempatan kepada perempuan untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri dan kebanggaan serta kepemilikan terhadap kelompoknya.

Data lapangan menunjukkan usaha kecil yang dijalankan para perempuan hanya cukup memenuhi sebagian kebutuhan sehari-hari. Mereka harus berpikir keras dan membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya. Untuk itu mereka harus menjalani pekerjaan sampingan sebagai pekerja rumah tangga harian dengan upah 35 ribu rupiah atau sebagai PSK yang dilakukan secara terpaksa. Seperti penuturan CC (2018, wawancara 9 April). "*Nya kumaha deui atuh teh, abdi gaduh putra seueur, jajan na kumaha, kaperyogian sakola na sareng sajabana.*" (Ya bagaimana lagi, saya punya anak banyak, jajannya gimana, kebutuhan sekolahnya dan lain-lain.)

CC memiliki satu putra dan dua putri dari pernikahannya yang pertama, anak pertama putus sekolah hingga sekolah dasar, anak kedua kelas 5 SD, dan anak bungsu baru masuk sekolah tahun 2018 ini. Dari pernikahannya yang kedua ia tidak memiliki anak. Sementara saat ini ia masih betah menjanda, dan memiliki seorang kekasih. Terkadang ia terpaksa menjadi PSK untuk memenuhi kebutuhan harian, anak-anak, adik dan ibunya yang juga seorang janda. Ketika masih bersama suami keduanya, CC berinisiatif bergabung dengan kelompok dan bersikeras mengikuti kelompok meskipun suaminya melarang. Akhirnya ia bercerai karena dipicu oleh beberapa hal.

Kelima informan memiliki kebebasan untuk mengutarakan pendapat dalam kelompoknya, apabila ada hal yang menurut mereka tidak sesuai. Misalnya terkait kebijakan tanggung renteng yang telah disepakati oleh calon nasabah dan menjadi persyaratan diawal ketika akan mendapatkan kredit. Seorang subjek ada yang mampu menolak ketika diminta iuran menanggung anggota lain yang tidak mampu membayar, karena yang bersangkutan tidak memiliki uang dan harus memenuhi kebutuhan yang lain. Begitu juga ketika mereka

mengalami konflik internal dengan petugas koperasi yang tidak bersedia mencairkan pinjaman kredit di periode 2018 karena persoalan internal petugas dengan perempuan anggota kelompok. Para perempuan ini kemudian mendatangi kantor cabang koperasi di kecamatan untuk menyelesaikan persoalan hingga tuntas.

Dimensi otonomi kolektif perempuan berkaitan dengan konsep *power with* dari Linda Mayoux. *Power with* dimaknai sebagai upaya kolektif perempuan dalam sebuah kelompok yang memiliki tujuan dan kepentingan bersama. Pada konteks ini, kelompok simpan pinjam perempuan merupakan wadah organisasi yang dibentuk sebagai persyaratan mendapatkan kredit dari koperasi. Di awal terbentuknya kelompok perempuan tersebut, sebagian masyarakat memandang sebelah mata terhadap orang-orang yang bergabung dan menganggap mereka memiliki banyak utang. Namun seiring berjalannya waktu, para perempuan anggota kelompok mampu menunjukkan eksistensinya dengan taat dan disiplin mengembalikan pinjaman. Lambat laun masyarakat mengakui keberadaan kelompok perempuan meskipun belum dilibatkan dalam penyusunan program terkait pemberdayaan perempuan di tingkat desa.

Jejaring dan mobilitas para perempuan ini belum berkembang secara signifikan. Mereka juga belum dapat berpartisipasi dan berkontribusi pada perubahan sosial dan politik di masyarakat. Oleh karena itu unsur pendekatan pengembangan masyarakat (*community development approach*), serta pendekatan pemberdayaan feminis (*feminist empowerment approach*) dari Mayoux belum terpenuhi. Ini mengingat program pemberian kredit oleh koperasi belum mampu membuat para perempuan tersebut mandiri melalui usaha yang dijalankan dan memiliki kesinambungan finansial.

Kelompok yang dibentuk juga tidak diikuti dengan upaya menumbuhkan pendidikan dan kesadaran kritis bagi anggotanya untuk dapat keluar dari kemiskinan dan tidak tergantung pada pinjaman kredit semata. Temuan lapangan juga memperlihatkan para perempuan kepala keluarga tersebut tidak hanya mempunyai pinjaman dari satu sumber, tetapi rata-rata mereka memiliki pinjaman lain dengan ketentuan pembayaran angsuran yang beragam baik dari program yang diberikan oleh bank, program pemerintah seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) maupun rentenir dengan tagihan angsuran harian, mingguan, atau bulanan.

## Penutup

Program simpan pinjam yang digulirkan koperasi implementasinya masih dalam rangka memenuhi kebutuhan praktis dengan menyediakan kredit bagi perempuan yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Program tersebut belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan seperti yang ditawarkan Mayoux dalam skema *virtuous spiral*-nya yakni program keuangan mikro diharapkan dapat berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi, sosial dan politik perempuan. Program yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan strategis perempuan dalam meningkatkan status, peran, posisi dan kedudukan perempuan kepala keluarga di masyarakat termasuk lingkup kebijakan di tingkat desa. Ini dikarenakan para perempuan tersebut berada pada kelompok lapisan terbawah dalam masyarakat dan menempati posisi di luar jaring pengaman desa.

Partisipasi Pekka dalam kelompok simpan pinjam meningkatkan akses perempuan pada kredit untuk mendapatkan manfaat ekonomi bagi kehidupan keluarga. Namun akses kredit bagi Pekka hanya membuat mereka terbebas sementara dari kekurangan modal usaha dengan sedikit keuntungan yang mereka peroleh. Akan tetapi, kelompok telah memberikan kesempatan bagi perempuan dalam meningkatkan rasa kepercayaan dan kebanggaan diri serta solidaritas antaranggota.

Pembentukan kelompok perempuan hanya berorientasi pada dimensi ekonomi tanpa diikuti peningkatan kapasitas. Koperasi tidak memberikan pelatihan secara kontinu bagi kelompok perempuan anggotanya. Untuk itu di masa mendatang koperasi maupun lembaga keuangan mikro serupa lainnya perlu memberikan penguatan kapasitas internal bagi perempuan baik yang bersifat praktis maupun strategis dalam rangka menciptakan kesadaran kritis dan memberdayakan perempuan.

Dimensi otonomi individual terjadi secara signifikan baik pada Pekka yang berstatus sebagai janda maupun istri yang memiliki suami. Adapun cakupan otonomi individual Pekka meliputi pengambilan keputusan dalam penggunaan anggaran rumah tangga, termasuk keputusan dalam memanfaatkan pinjaman kredit. Sementara cakupan otonomi kolektif mencakup akses dan kontrol Pekka dalam kelompok. Keterlibatan perempuan dalam kelompok secara nyata mampu membuat mereka memiliki posisi tawar yang relatif tinggi dalam rumah tangga.

Merujuk pada elemen kunci pemberdayaan yang ditawarkan oleh Mayoux, kekuatan *power within*, *power*

*to*, serta *power over* berkaitan erat dengan otonomi individual perempuan kepala keluarga. Sementara *power with* memiliki keterikatan dengan otonomi kolektif perempuan, meskipun dalam hal ini otonomi kolektif perempuan dalam kelompok tidak berbanding lurus dengan otonomi individual perempuan kepala keluarga karena otonomi selalu berada dalam dinamika otoritas yang berbeda antara individu yang satu dan individu yang lain. Namun demikian, perlu dipahami bahwa baik otonomi individual maupun kolektif saling terkait dan memiliki pengaruh satu sama lain.

Kekuatan *power to* dan *power within* hendaknya dimiliki perempuan terutama terkait dengan otonominya tanpa mengesampingkan unsur *power over* yang dimaknai sebagai kekuasaan atas apapun. Begitupun dengan konsep *power with* yang harus pula dipahami sebagai upaya kolektif perempuan dalam berorganisasi untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama perempuan lainnya dalam kelompok. Otonomi menjadi penting untuk dikaji mengingat otonomi dapat berpengaruh pada kehidupan perempuan dalam hal ini perempuan kepala keluarga yang secara *de facto* merupakan pencari nafkah, pengelola rumah tangga, juga penjaga keberlangsungan hidup dan kehidupan termasuk pengambil keputusan dalam keluarga.

## Daftar Pustaka

- Barrios, PL 2012, *Relationship between Household Structure, Maternal Autonomy and Undernutrition in Brazilian Children*, thesis, Graduate School-New Brunswick Rutgers, The State University of New Jersey New Brunswick, New Jersey.
- BPS 2018, *Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga 2009-2017*, dilihat 31 Oktober 2018, <https://www.bps.go.id/statictable/2012/04/19/1604/persentase-rumah-tangga-menurut-provinsi-daerah-tempat-tinggal-dan-jenis-kelamin-kepala-rumah-tangga-2009-2017.html>
- Drolet, JL 2005, *Women and Micro Credit: Towards an Understanding of Women's Experiences in Cairo, Egypt*, thesis, The School of Social Work, McGill University, Montreal.
- Fakih, M 2013, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hartini, T 2012, "Pemberdayaan Ekonomi Perempuan: keluar dari Kemiskinan", *Jurnal Perempuan*, vol. 17, no. 3, hh. 65-81.
- Ibrahim, S & Sabina, A 2007, "Agency and Empowerment: A proposal for Internationally Comparable Indicator", *OPHI Working Paper Series*, Oxford Development Studies.
- Ikasari 2003, *Implikasi Program Pemberdayaan terhadap Otonomi Perempuan (Studi Kasus Program Tingkat Netral di Bina Swadaya dan Tingkat Positif di Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita*

(PPSW), tesis. Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

Jejeebhoy, SJ & Sathar, ZA 2001, "Women's Autonomy in India and Pakistan: The Influence of Religion and Region", *Population and Development Review*, vol. 27, no. 4, hh. 687-712, dilihat 14 Mei 2017, <http://www.jstor.org/stable/2695183>

Mayoux, L 1998, "Women's Empowerment and Micro-Finance Programmes: Strategies for Increasing Impact", *Development in Practice*, vol. 8, no.2, hh. 235-241, dilihat 23 Juni 2018, <http://www.jstor.org/stable/4029310>

Mishra, NK & Tripathi, T 2011, "Conceptualising Women's Agency, Autonomy, and Empowerment", *Economic & Political weekly*, vol. XLVI, no. 11, hh. 58-65, dilihat 20 Desember 2017, <http://about.jstor.org/terms>

Munti, RB 1999, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Lembaga Kajian Agama dan Jender, Perserikatan Solidaritas Perempuan, & The Asia Foundation, Jakarta.

Mosse, D 2010, "A Relational Approach to Durable Poverty, Inequality and Power", *The Journal of Development Studies*, vol. 46, no. 7, hh. 1156-1178.

Seknas PEKKA 2010, *Laporan Tahunan Sekretariat Nasional Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Pekka*, Seknas PEKKA, Jakarta.

Seknas PEKKA 2015, *Leaflet Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga*, Seknas PEKKA, Jakarta.

Saptari, R & Holzner, B 2016, *Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, Kalyanamitra dan Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.

Srimulyani, E 2013, "Women, Micro-finance and Income Generation after the Political Conflict and the Tsunami in Aceh", *Asian Journal of Women's Studies*, vol. 19, no. 1, hh. 93-112, dilihat 17 Oktober 2017, doi: 10.1080/12259276.2013.11666143

Yuliantini, L 2018, Otonomi Perempuan Kepala Keluarga dalam Keterlibatannya pada Kegiatan Simpan Pinjam (Studi Kasus pada Program Simpan Pinjam di Kecamatan Cisu, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat), tesis, Program Studi Kajian Gender Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, Jakarta.

Veltman, A & Piper, M 2014, *Autonomy, Oppression, and Gender*, Oxford University Press, NY.

World Bank 2012, *World Development Report 2012: Gender Equality and Development*, The World Bank, Washington DC.

## Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, 2 Januari 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Jakarta.

## **Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari**

1. Prof. Sylvia Tiwon (University of California, Berkeley)
2. Prof. Dr. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah)
3. Dr. Widjanti M Santoso (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
4. Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Universitas Indonesia)
5. Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga)
6. Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)



## ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

**Jurnal Perempuan** (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan menguraikan persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada ([redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:  
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.  
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, [http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational\\_for\\_PSWG\\_en\\_Indonesia.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf)  
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.  
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.  
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi [redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com) untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN  
**YJP**  
JURNAL  
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A  
Jati Padang, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan 12540  
INDONESIA  
Phone/Fax: +62 21 22701689

